

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 TEUPAH TENGAH KABUPATEN
SIMEULUE**

SKRIPSI

Oleh:

MIRZA REZKI ALAFANTA

NPM : 1303100040

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERNYATAAN



Dengan ini saya MIRZA REZKI ALAFANTA, NPM 1303100040 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau meniplak atau menganbil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan,.....,April 2017

MIRZA RIZKI ALAFANTA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 5 TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

Oleh:

MIRZA RIZKI ALAFANTA

1303100040

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 untuk melaksanakan kriteria minimal pendidikan diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yaitu belum meratanya mutu pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang seharusnya wajib dipenuhi oleh Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Dengan adanya permasalahan ini Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue belum mencapai Standar Nasional Pendidikan seperti Standar Sarana dan prasaran. oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. Adapun tujuan dari Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Adapun metode penelitian mengunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu perosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini sudah mulai maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan masih kurangnya kesadaran wali murid akan penerapan pelaksanaan kebijakan standar nasional pendidikan yang merupakan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

KATA PENGANTAR



Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerahnya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 5 TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE

Shalawat beriringan salam juga penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin memnyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu Ayahanda **Samsudin** dan Ibunda **Misdarwati** yang telah

mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, dan yang selalu mendukung dan memotivasi serta do'a restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah ke depan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan ajaran islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringatmu wahai orang tua ku, aku bisa menggapai cita, dan hari ini telah kudapatkan apa yang telah ku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran. Dan untuk Bapak dan Mamak, insya'Allah Mirza akan menjadi apa yang Bapak dan Mamak dambakan, Mirza akan menjaga apa yang telah Mirza dapatkan ini dengan baik. Amiin.. Mirza sangat menyayangi dan mencintai Ayah dan Ibu.

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Kepada Bapak Drs. Agussani, M.AP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs.Tasrif Syam, M.si. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.ip, M.pd. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing I.
4. Ibu Dra. Marlinang Sibuea., M.pd selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta waktunya membimbing saya.

5. Dosen dan seluruh pegawai staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Saidin S.pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Dan para guru-guru yang ada di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
9. Sahabat perjuangan saya Renzo Nofrihadi Putra, Muhammad Haikal Akbar, Riko Ananda, Mustaqim, Rahman Amin, Qadri Ersan terima kasih untuk semua pengalaman momen seni dan inspirasi selama perkuliahan kepada penulis.
10. Dan kepada kekasihku Sri Padli anum Pasaribu yang selalu memberikan ku semangat dan doa yang sama-sama berjuang melawan kerasnya kehidupan ini. Semoga keberhasilan juga kesuksesan selalu menyertai kita.
11. Dan kepada semua rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU angkatan 2013, mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja dan telah menyusahkan kalian semua, terima kasih untuk semuanya.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.... AMIIN.

Medan,.....,April 2017

MIRZA RIZKI ALAFANTA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
A. Pengertian Implementasi	7
B. Pengertian Kebijakan	8
C. Pengertian kebijakan publik.....	10
D. Pengertian Implementasi Kebijakan publik.....	13
E. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi	15
F. Pengertian pendidikan	17
G. Pengertian mutu pendidikan	22
H. Standar nasional pendidikan	24
I. Pengertian kebijakan pendidikan	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data	33
B. Definisi Konsep.....	35
C. Krangka Konsep.....	36
D. Kategorisasi	36
E. Narasumber.....	37
F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek penelitian.....	38
G. Struktur organisasi sekolah.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	55

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu pilar yang dapat menciptakan sumberdaya manusia yang unggul untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangan sumberdaya manusia dilihat dari aspek pendidikan berarti mengembangkan pendidikan baik secara aspek kuantitas maupun aspek kualitas.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data UNESCO (2012) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO *Education For All Global Monitoring Report 2012*. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (*Education Development Index, EDI*), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011.

Dari aspek kuantitas diharapkan dapat menekan perluasan sekolah sehingga penduduk memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang status sosial. Sedangkan dari aspek kualitas, pengembangan sumberdaya manusia berarti pendidikan dari sekolah dapat diharapkan meningkat

dari waktu ke waktu. kualitas sekolah memiliki standar bahwa lulusan sekolah sebagai tempat memperoleh pendidikan secara formal serta memiliki kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan sehingga dapat mendukung pertumbuhan nasional dan daerah.

Peningkatan mutu pendidikan melalui standar nasional pendidikan menuntut sekolah dapat melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan disekolah juga bergantung pada guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ketiga figur tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain.

Standar nasional pendidikan merupakan standar minimal pendidikan di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Lebih jelas standar nasional pendidikan diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu melalui standar pendidikan direfleksikan dalam berbagai kebijakan pembangunan pendidikan secara sistematis telah lama dilakukan sejak rencana pembangunan lima tahun pertama. Berbagai program inovasi pendidikan melalui standar nasional pendidikan belum menunjukkan hasil pencapaian peningkatan mutu pendidikan yang mampu membangun daya saing bangsa.

Standar nasional pendidikan yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan seperti standar sarana dan prasarana. Standar sarana prasarana yang diisyaratkan adalah setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana meliputi prabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana lahan, ruang kelas, ruang pemimpin, satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang unit produksi, ruang kantin instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah dan ruang-ruang pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar inilah yang paling bermasalah di Indonesia, karena jika dibangun didaerah terpencil akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan peralatan lain yang tidak lengkap, hal itu mengakibatkan siswa hanya mengetahui benda praktik hanya dilihat dari gambar saja dan tidak dalam bentuk nyata. Dimana siswa hanya disuguhkan pengetahuan kognitif saja untuk efektif dan psikomotoriknya tidak terpenuhi.

Di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi ruangan kelas, aula, mesjid, lapangan voli, Unit Kesehatan Siswa (UKS), media pendidikan, dan alat habis pakai.

Dari pemaparan diatas maka dapat dilihat masih minimnya sarana dan prasarana dalam standar nasional pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang seharusnya wajib di penuhi oleh Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang standar nasional pendidikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai standar nasional pendidikan dengan judul :**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM RANGKAT MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 5 TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimana Implementasi peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue ,

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar

nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Penulis dapat mengetahui suatu kebijakan yang sudah sesuai dengan diimplementasikan atau akan di implementasikan, apakah sesuai dengan harapan atau belum.
- b. untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis.
- c. Sebagai bahan masukan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik umsu jurusan Ilmu Administrasi Negara.

D. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Uraian Teoritis

Bab ini menguraikan tentang pengertian kebijakan, dan kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

publik, pengertian pemerintahan mukim, pengertian pembangunan, pengertian otonomi daerah khusus, dan peraturan daerah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil yang diteliti

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah dan keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di capai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu /pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Wahab (2005:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis,

sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakn publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan public, yaitu :

- 1) Kebijakan public itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Kebijakan public, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karna itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

B. Pengertian kebijakan

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep

kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukakan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertanahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Menurut Anderson dalam wahab (2005:03) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Menurut Dye (2005:17) kebijakn adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pedoman pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin(2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu cirri kebijakan”*what government do or not to do*’kebijakan dari pemerintah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup member pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisesnsi.Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Agustiono (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Dari uraian definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau

tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakannya dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah atau tujuan, formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- a) Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karna ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b) Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsure yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c) Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karna diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.

- d) Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjut yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e) Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa darisaran ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

a) Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah yang memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mengidentifikasi penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memandulkan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b) Peramalan

peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari ambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan

plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengetimasi kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengetimasi kelayanan politik dari berbagai pilihan.

c) Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan, ini membuat pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengetimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda.

d) Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e) Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap prose pembuatan kebijakan.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penenrapan. Istilah implimentasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah dll.Suatu kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai prubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2014:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memeberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang

dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari defenisi dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, ktivitas atau kegiatan pencapai tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

E. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik yang peluang-peluang keberhasilannya, diantaranya adalah :

a) Isi Kebijakan

kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan yaitu :

- (a) Tujuan yang tidak cukup terperinci
- (b) Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- (c) program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b) Kurang Informasi

kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksanaan dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c) Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pihak, baik itu parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah:

- 1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- 2) Kelemahan institusi
- 3) Ketidakmampuan SDM dalam bidang teknis administratif
- 4) Kekurangan bantuan teknis
- 5) Penganturan waktu
- 6) Sistem informasi yang mendukung
- 7) Perbedaan agenda tujuan antar aktor
- 8) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- 9) Dukungan dan kesinambungan

Implementasi seharusnya di analisis dalam konteks “struktur institusional” Yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang diimplementasi dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi, organisasi lokal maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buru. Program tidak dapat diimplementasikan oleh satu organisasi saja, tetapi harus melalui matrix atas serangkaian kumpulan organisasi.

F. Pengertian Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya ialah sebuah kebutuhan yang begitu diperlukan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Kemungkinan besar pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari orang tua kepada anak-anaknya dan Negara kepada rakyatnya. Menurut Amri (2013:5) pendidikan diartikan :

- 1) Serangkaian bentuk proses seseorang atau anak mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk lainnya yang bernilai ataupun berguna dimasyarakat.
- 2) Proses sosial dimana orang-orang atau anak-anak dipengaruhi dengan lingkungan yang (sengaja) dipilih dan dikendalikan (misalnya oleh guru di sekolah) sehingga mereka memperoleh kemampuan-kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal.

Menurut Amin dan Nur (2010:20) menyatakan pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosial dan membantu meneruskan adat budaya serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi.

Pendidikan di anggap begitu penting pada dewasa ini, sehingga pendidikan sangat berguna bagi masyarakat maju sehingga penulis mengambil kesimpulan pendidikan merupakan proses belajar yang bertujuan untuk dirinya dan bangsa agar dapat menjadi sumberdaya yang unggul.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan

Ilmu pendidikan mengemukakan beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Para ahli pendidikan membagi beberapa faktor pendidikan tersebut, diantaranya :

a) Faktor pendidik

Menurut Amri (2013:7) pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan atau kedewasaan seseorang anak. Jadi sebenarnya seseorang disebut pendidik itu karna memiliki peran serta tanggung jawab terhadap peserta didik untuk dapat mendidik seorang anak.

b) Faktor Anak Didik

Menurut Amri (2013:9) sifat khas peserta didik dapat ditemukan sebagai berikut:

- 1) Anak didik adalah seseorang yang belum dewasa atau belum memperoleh kedewasaan. Ia masih menjadi tanggung jawab seorang pendidik tertentu.
- 2) Anak didik adalah yang sedang berkembang, sejak ia lahir sampai meninggal, dan anak akan mengalami perkembangan karna itu pendidikan harus membantu membimbing perkembangan anak baik perkembangan jiwa dan mental, pengetahuan dan pengawasan diri terhadap lingkungan

sosialnya. Untuk itu maka setiap pendidikan harus mengerti betul perkembangan kejiwaan anak.

- 3) Dasar hakiki anak didik adalah dapat dididik dan harus dididik. Barnabib dalam Amri (2013:9) menyatakan anak hakikatnya adalah makhluk yang dapat dididik, karna anak mempunyai bakat dan disposisi-disposisi yang memungkinkan pendidikan dan anak harus didik karna hakikatnya anak memilih benih-benih sebagai mahluk susila tetapi tanpa pendidikan anak didik tidak mungkin memiliki pribadi susila.

c) Faktor Tujuan

Tujuan pendidikan adalah faktor utama yang harus diperhatikan, dipergunakan oleh setiap pendidikan yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan.

Ada dua faktor dari tujuan pendidikan diantaranya :

- 1) Hakikat tujuan pendidikan
- 2) Macam-macam tujuan pendidikan
 - a) Tujuan umum, tujuan umum ini juga disebut tujuan akhir atau tujuan keseluruhan yang sudah lengkap mau dibawah kemana pendidikan ini diselenggarakan
 - b) Tujuan khusus, tujuan ini adalah penghususan dari tujuan umum dikarnakan untuk menuju kepada kondisi umum, perlu adanya tujuan khusus yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, seperti :

- (a) Cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa
 - (b) Tugas suatu badan atau lembaga pendidikan
 - (c) Bakat dan kemampuan anak didik
 - (d) Kesanggupan-kesanggupan yang ada pada anak didik
 - (e) Tingkat pendidik, dan sebagainya
- c) tujuan seketika, dimana tujuan ini dikaranakan timbul secara kebetulan atau mendadak dan hanya bersifat sesaat
 - d) Tujuan sementara, tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang dicapai anak didik pada setiap fase perkembangan, contohnya anak dapat berhitung dan menjaga kebersihan diri
 - e) Tujuan tidak lengkap, tujuan ini erat hubungannya dengan aspek pendidikan yang akan membentuk aspek kepribadian manusia.
 - f) Tujuan perantara, merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.
- d) Faktor alat

Menurut Amri (2013:14) yang dimaksud faktor alat ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya pendidikan.

Menurut Amri (2013:15) alat pendidikan terbagi atas dua golongan yaitu :

- 1) Alat pendidikan prefetive yaitu alat yang bersifat pencegahan yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan atau pencapaian tujuan pendidikan.
- 2) Alat pendidik refresife yaitu sering disebut alat pendidikan kuratif atau alat pendidik korektif. Alat pendidikan ini digunakan manakalah anak

melakukan suatu perbuatan yang di anggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau anak melanggar ketentuan yang berlaku.

e. faktor lingkuan

Ki Hajar Dewantara membagi faktor lingkuan menjadi tiga bagian, yang terkenal istilah TRI PUSAT PENDIDIKAN yaitu tiga pusat pendidikan diantaranya : 1.Lingkuan keluarga; 2.Lingkungan sekolah; 3.Lingkungan masyarakat organisasi pemuda

2. Landasan dan asas pendidikan

a) Landasan pendidikan

Menurut Amin dan Nur (2010:27-32) landasan pendidikan yang ada di Indonesia adalah :

- 1) Landasan filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis adalah Pancasila.
- 2) Landasan psikologis, merupakan kondisi fisik dan psikis dari peserta didik. Pendidikan pada dasarnya membantu peserta didik untuk dapat menumbuh dan mengembangkan potensi secara optimal yang mana kegiatan itu lebih bertumpuh psikologis peserta didik.
- 3) Landasan sosial dan budaya merupakan pendidikan sebagai gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan sosial, individu dan kultur.
- 4) Landasan hukum dalam pasal 2 undang-undang republik Indonesia no 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan

pancasila dan UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan adalah pengalaman pancasila, yaitu pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri.

- 5) Landasan ilmiah dan teknologi, dunia pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari dunia pengetahuan dan teknologi. Agar pendidikan dalam terbebas dari keraguan-keraguan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebisa mungkin dibawah ukuran-ukuran atau standart yang jelas.

b) Asas Pendidikan

Asas pendidikan diantaranya adalah :

1. Asas belajar sepanjang hayat
2. Asas tut wuri handayani
3. Asas kemandirian dalam belajar
4. Asas ketepatangunaan dalam pendidikan

G. Pengertian mutu pendidikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam depdiknas (2005:768) motto adalah baik atau buruknya suatu benda, kadar, taraf/drajat, misalnya kepandaian atau kecerdasan dan sebagainya. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh Dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Yaitu, mutu yang bersifat tangible dimana artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk aktifitas menurut suryo Subroto (2004:210) mutu dibedakan atas dua hal atau prilaku.Sedangkan mutu yang intangible adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau

diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami. Misalnya disiplin, keakraban, kebersihan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Gravid dan Davis dalam Hadi dan Nurhayati (2012:86) mutu adalah suatu kondidium dinamika yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu tersebut diperlukan peningkatan atau perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen.

Amri (2013:18) mengatakan mutu dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, dimana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan kenginginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik. Mutu pendidikan berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dari uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan tercapainya kualitas maupun kuantitas yang diharapkan agar masyarakat merasa puas.

1) Strategi pengembangan mutu

Kekuatan dalam melakukan perubahan dapat memperlihatkan fenomena yang terus berkelanjutan dalam pemenuhan akan perubahan tersebut. Akhirnya akan mendorong dalam upaya pemilihan strategi yang dapat diterapkan pada kondisi-kondisi yang terduga maupun tidak terduga yang kemudian akan muncul. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada kemampuan dalam kepemimpinan

untuk berani membuat komitmen, menghubungkan strategi dan visi yang tetap mengatur sumber-sumber yang mendukung terlaksananya strategi.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan analisis SWOT. Dimana S merupakan strength yang berarti kekuatan seperti beberapa guru sudah mulai melanjutkan jenjang strata satu, W merupakan weaknesses yang berarti kelemahan seperti sarana dan prasarana dalam kondisi yang sudah tua, O sertifikasi guru yang berguna untuk meningkatkan kinerja guru dan T merupakan threat yang berarti ancaman seperti adanya ketimpangan pembangunan antar sekolah daerah pinggiran kota dengan daerah kota. Tujuan analisis ini untuk mengetahui posisi sekolah, apakah sudah maju atau masih tertinggal dalam mutu pendidikan.

2) Pengawasan mutu

Pengawasan mutu pendidikan dapat dilaksanakan sejak input/masukan (siswa) masuk sekolah, mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dan hingga menjadi lulusan dengan berbagai kompetensi yang dimiliki.

Menurut Amri (2013:21) untuk melihat perkembangan pendidikan di sekolah dan staf guru-gurunya memanfaatkan data yang ada di sekolah yang berhubungan dengan mutu sekolah dan mengelolah menjadi diagram, tukar pikiran menggunakan static mutu yang memuat informasi tentang rata-rata mutu pendidikan, standar devias/simpangan baku dari mutu pendidikan di sekolah.

H. Standar Nasional Pendidikan

Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah

hukum Negara kesatuan republik Indonesia. Sehingga dengan adanya standart nasional pendidikan maka Negara secara langsung mewajibkan setiap sekolah yang ada di wilayah Negara Indonesia untuk patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah dalam rangka meratakan kriteria minimal pendidikan diseluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. standart nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. Standar nasional pendidikan terdiri 8 kriteria yaitu :

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satu pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan meliputi :

- a) SKL satuan pendidikan dan kelompok mata pelajaran
- b) SKL mata pelajaran SD-MTs
- c) SKL mata pelajaran SMA-MA
- d) SKL mata pelajaran SMK-MAK

2) Standar isi

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi keastaraan pendidikan program paket.

3) Standar proses pendidikan

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta member ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidikan memeberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien.

4) Standar Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memilikin kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijaza dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangn yang berlaku.

5) Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel ruang kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6) Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan terdiri atas 3 bagian yaitu :

- a) Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan.
- b) Standar pengelolaan oleh pemerintah Daerah.
- c) Standar pengelolaan oleh pemerintah.

7) Standar pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas :

- a) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

- b) Biaya personal sebagaimana dimaksudkan pada diatas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c) Biaya oprasi satuan pendidikan meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

8) Standar penilaian pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas : penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasiln belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- (a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- (b) Penilaian hasil belajar oleh satauan pendidikan
- (c) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

I. Pengertian kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan (dalam Nugroho, 2008:36) diartikan sebagai kumpulan hokum atau aturan yang mengatur pelaksanaan system pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-

negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercapai keselarasan antar kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

1) Kebijakan-kebijakan umum

Secara umum kebijakan pemerintah tentang UUD 1945 yaitu pasal 28 dan pasal 31. Bunyi pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sedangkan dalam pasal 28 huruf e disebutkan sebagai berikut :”setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.dalam pasal 31 dikatakan sebagai berikut.

- a) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
- b) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional

- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Dari beberapa pasal diatas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi suatu kewajiban terutama pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya pemerintah wajib pula membiayainya dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain pembiayaan pemerintah melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan baik mutu maupun jumlah. Sehingga apapun bentuknya akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi belajar peserta didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan belajar

1) Arah Kebijakan pendidikan Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan undang-undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju

terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c) Melakukan pembaharuan system pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dan didukung oleh saran dan prasarana memadai.
- e) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni.

- g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dungan dan lingkungan sesuai dengan potensinya.
- h) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
- i) Aplikasi penerapan kebijakan pendidikan dalam pengembangan Ilmu Teknologi pendidikan di Indonesia.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

b. Data skunder

Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data skunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

c. Teknik analisis data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

B. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

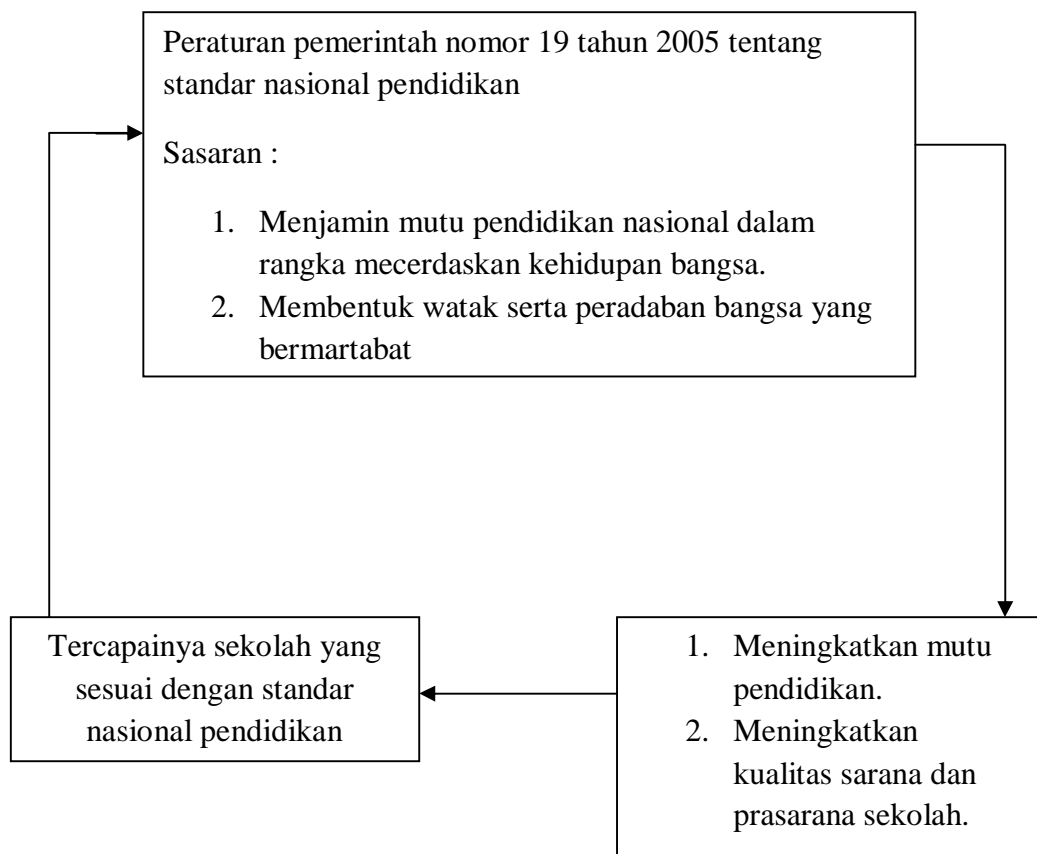
- a) Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik pada kehidupan kedepannya.
- b) Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada dikehidupan sosial masyarakat.
- c) Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan dikehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku didalam bermasyarakat.
- d) Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat.

C. Kerangka Konsep

Sebagai dasar acuan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga di

ketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah.
- 2) Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- 3) Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan.
- 4) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kepala sekolah SD Negeri 5 Teupah tengah

- 1) Nama : Saidin S.pd
- 2) Umur : 35 tahun
- 3) Jabatan : Kepala sekolah
- 4) Pendidikan : S.1

B. Tata Usaha SD Negeri 5 Teupah Tengah

- 1) Nama : Isma Yunita S.pd
- 2) Umur : 34 tahun
- 3) Jabatan : Tata usaha Sekolah
- 4) Pendidikan : S.1 PGSD

C. Guru SD Negeri 5 Teupah Tengah

- 1) Nama : Oma Noverita S.pd
- 2) Umur : 36 tahun
- 3) Jabatan : Guru Kelas
- 4) Pendidikan : S.1 PGSD

D. Guru SD Negeri 5 Teupah Tengah

- 1) Nama : Mimi Erniza S.pd
- 2) Umur : 33 tahun
- 3) Jabatan : Guru Kelas
- 4) Pendidikan : S.1 PGSD

E. Orang Tua Siswa SD Negeri 5 Teupah Tengah

- 1) Nama : Rohaya
- 2) Umur : 45 tahun
- 3) Pendidikan : SMA

F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat SD Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue

Hampir sebagian besar orang tua berusaha mencari lembaga pendidikan yang kondusif terhadap anaknya terutama pendidikan dasar. Hal ini dilakukan karena pendidikan anak pada tingkat dasar menjadi bagian terpenting dalam dalam proses perjalanan masa depan yang akan dijalani anak yang mampu menjalani tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan datang. Namun dalam pencarian lembaga pendidikan tersebut, orang tua diharapkan dapat mempelajari dan melihat langsung keberadaan sekolah

tersebut. Baik dari segi sarana, fasilitas, tujuan, kurikulum maupun tenaga pengajarnya.

Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah yang berada di jalan Teungku Diujung km 13 Desa Sua-Sua berdiri pada tanggal 8-9-1983, pada tahun awal berdiri sekolah SD Negeri 5 ini keadaan sekolah sangat memprihatinkan sebab lantai kelas masih beralaskan tanah dan setiap kelas memiliki keadaan yang sangat memprihatinkan. Ruangan kelas tidak sepenuhnya tertutup hanya setengah bagian yang tertutup dan jika melihat kebawah dapat langsung melihat ke kelas lain atau keluar kelas. Ruangan kelas juga masih berdiri beberapa kelas saja, dan tenaga pendidiknyapun hanya sukarelawan dari penduduk setempat yang memiliki pendidikan yang lebih baik dari yang lain. Dan pada tahun 1994 Sekolah Dasar Negeri 5 yang berada di jalan Teungku Diujung km 13 Desa Sua-Sua kabupaten Simeulue mengalami peralihan, dan semenjak masa peralihan tersebut mulailah tahap demi tahap sekolah menjalani perubahan pembangunan sarana dan prasarana mulai dari segi fisik sekolah terus mengalami peningkatan yang akan menunjang kemajuan mutu pendidikan sesuai standar. Ruang kelas yang dahulunya tidak mendukung belajar siswa sekarang sudah mengalami peningkatan, fasilitas disekolah hampir seluruhnya terpenuhi dan tenaga pengajar sudah berpendidikan sarjana serta mendapat sertifikasi oleh dinas.

Adapun status Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2**Status Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah**

Kepemilikan	Pemerintah Daerah
No.Sertifikat	271 / x
No.Statistik Sekolah	1010609010005
NPSN	10103314
NSB	-
NDS	-
Akreditasi	C

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue 2016/2017

Tabel 3.3**Pihak pengajar/ketenagaan sekolah menurut golongan di SD Negeri 5**

Tenaga administrasi non PNS	-
Guru PNS	13
Guru non PNS	-
Guru kontrak	3
Guru bakti	2

Sumber : Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue 2016/2017

2. Visi Misi dan Tujuan Sekolah**Visi :**

- a. Menciptakan siswa unggul dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
- b. Menjadi sekolah yang dipercaya masyarakat.

Misi :

- a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien.
- b. Menumbuh kembangkan semangat berpotensi pada setiap siswa.
- c. Mendorong dan mengenali siswa untuk mengenali potensi dirinya.
- d. Menumbuhkembangkan penghormatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa.
- e. Menumbuhkembangkan rasa saling hormat-menghormati, saling menyayangi diantara sesama siswa, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
- f. Membangun citra sekolah sebagaimana mitra terpercaya dimasyarakat.

3. Tujuan sekolah terdiri dari :**a. Tujuan umum pendidikan**

Agar siswa memiliki ahlak dan budi pekerti yang luhur, serta kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

b. Tujuan Khusus Pendidikan SD Negeri 5 Teupah Tengah

- A. Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia.
- B. Siswa mempunyai dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- C. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya.

D. Siswa kreatif, terampil dan bekerja keras untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah Dan Guru

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah juga harus mengacu pada permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah, meliputi :

1. Perencanaan program, 2. Pelaksanaan rencana kerja, 3. Pengawasan dan evaluasi, 4. Kepemimpinan sekolah, 5. Sistem informasi sekolah.

Berdasarkan permendiknas No 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah meliputi :

- a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah.
- b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan, dan
- c. Usaha pengembangan profesional sebagai kepala sekolah.

Berikut ini tugas pokok dan fungsi kepala sekolah :

2. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Guru adalah sebagai sosok teladan, sosok yang dipuji dan ditiru sudah sewajarnya akan selalu ingat tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru, dengan demikian ketika seorang guru senantiasa memperhatikan, mengingat dan menjalankan apa yang menjadi tupoksinya maka ia berhak menyandang gelar guru professional berkaitan dengan pendidikan di lembaga sekolah, ada 3 tugas pokok guru dalam pendidikan, uraiannya sebagai berikut :

- a. Mengajar
- b. Mendidik
- c. Melatih

G. Struktur Organisasi Sekolah

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu stuktur organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tuga-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis. Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur susunan organisasi Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah secara hirarkis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat di peroleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data perimer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dan juga akan di analisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan di uraikan berikut ini:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	1	20 %
2	Perempuan	4	80%
3	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, sedangkan berasal dari responden perempuan sebanyak 4 orang dengan persentase 80%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sarjana 1	3	60 %
2	Sarjana 2	1	20 %
3	SMA	1	20 %
4	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang terbanyak yaitu SMA dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, sarjana 1 dimana dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60% sarjana 2 dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

c. Distribusi narasumber menurut umur

Tabel 4.3

Tabel 3.5 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35	3	60%
2	36-50	2	40%
3	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber berusia 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60%, dan narasumber yang berusia 36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%.

1. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di SD Negeri 5 Teupah Tengah penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah.

Tujuan kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah untuk meningkatkan siswa yang ,kreatif, terampil, dan kerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan perlunya dukungan dari wali murid untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah di berikan oleh bupati sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at tanggal 24 februari 2017 pukul 10:00 wib dengan bapak Saidin, S.pd selaku kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, mnyatakan tujuan dan sasaran dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ialah menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, mengembangkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, demokrasi dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sudah maksimal di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah.

Sedangkan hasil wawancara hari sabtu tanggal 25 februari 2017 pukul 10:30 wib dengan ibu Isma Yunita, S.pd selaku tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 5

Teupah Tengah, menyatakan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yaitu melengkapi berbagai fasilitas yang serta adanya program perencanaan pengajaran yang bermutu dan berstandar nasional sudah mencapai tujuan dan terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Sementara hasil wawancara pada hari senin tanggal 27 februari 2017 pukul 9:00 wib dengan ibu Oma Noverita S.pd selaku guru SD Negeri 5 Teupah Tengah, mengatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yaitu melengkapi berbagai fasilitas dan program perencanaan Standar Nasional Pendidikan yang harus mengacu kepada buku panduan yang ada. Tujuan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sudah maksimal di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa tanggal 28 februari 2017 pukul 10:10 wib dengan Ibu mimi erniza S.pd selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa tujuan dan sasaran dengan cara mengikuti aturan-aturan yang berlaku, misalnya mengajar yang sesuai peraturan-peraturan yang mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang didalamnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan cara membuat rpp yang didalamnya memuat alokasi, waktu, skkd, indikator, tujuan pembelajaran, tujuan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sudah terlaksana dengan baik di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah.

Sedangkan hasil wawancara hari rabu tanggal 29 februari 2017 pukul 10:00 wib dengan Ibu rohaya selaku orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa tujuan dan sasaran dengan cara melengkapi fasilitas

yang lengkap serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk proses pembelajaran, sudah dilaksanakan dengan baik, dengan cara menerapkan aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue sudah mulai maksimal dikarenakan menghasilkan lulusan terbanyak pada tahun 2016 serta beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia dan mengembangkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokrasi dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang setandart nasional pendidikan adalah kurikulum yang berlaku dan perlunya kesadaran dari siswa untuk menjalankan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at tanggal 24 february 2017 pukul 10:00 wib dengan Bapak Saidin S.pd selaku kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan guru dan pihak sekolah sudah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kurikulum yang berjalan.

Sedangkan hasil wawancara hari sabtu tanggal 25 february 2017 pukul 10:30 wib dengan Ibu Isma Yunita s.pd selaku tata usaha Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa pihak sekolah pada umumnya telah mengacu pada pedoman yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan disekolah sudah berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai peraturan pemerintah harus mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara teratur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sekolah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara hari senin tanggal 27 february 2017 pukul 9:00 wib dengan Ibu Oma Noverita S.pd selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa pelaksanaan pedoman dengan berdasarkan kurikulum yang ada, sudah maksimal dikarenakan system pengajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Sedangkan wawancara hari selasa tanggal 28 february 2017 pukul 10:10 wib dengan Ibu Mimi Erniza S.pd selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa pelaksanaan pedoman dengan berdasarkan kurikulum yang berlaku, sudah maksimal dikarenakan system pengajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berjalan.

Sementara itu menurut Ibu Rohaya pada hari rabu tanggal 29 february 2017 pukul 10:00 wib selaku Orang Tua Siswa di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan dalam pelaksanaan belajar mengajar sudah mengacu kepada pedoman yang ada yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan dengan menjalankan kurikulum terbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pedoman atau aturan-aturan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah mulai maksimal hal ini dikarenakan guru mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara teratur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sekolah masing-masing.

3. Adanya prilaku/sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan.

Perilaku/sikap berdasarkan kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang setandart nasional pendidikan adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara hari Jum'at tanggal 24 february 2017 pukul 10:00 wib dengan Bapak Saidin S.pd selaku kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa pihak sekolah sudah sudah berperilaku dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah, bertanggung jawab dalam proses belajar dan mengajar dan prasarana sudah memadai sedangkan sumber belajar mengacu kepada alat media, barang cetak seperti buku paket siswa, peta dan lingkungan informasi.

Sebagaimana hasil wawancara hari Sabtu tanggal 25 february 2017 pukul 10:30 wib dengan Ibu Isma yunita S.pd sebagi Tata Usaha Sekolah Dasar negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa pihak sekolah sudah sudah bersperilaku dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah dan prasarana sudah memadai

sedangkan sumber belajar mengacu kepada alat media, barang cetak seperti buku paket siswa, peta dan lingkungan informasi.

Sedangkan hasil wawancara hari senin tanggal 27 februari 2017 pukul 9:00 wib dengan Ibu Oma Noverita S.pd selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, menyatakan bahwa perilaku dan tanggung jawab guru terhadap siswa sudah maksimal dikarkn proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa tanggal 28 februari 2017 pukul 10:10 wib dengan Ibu Mimi Erniza selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan bahwa pihak sekolah sudah sudah bersperilaku dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dan bertanggung jawab peroses belajar dan mengajar dan prasarana sudah memadai sedangkan sumber belajar mengacu kepada alat media, barang cetak seperti buku paket siswa.

Sebagaimana hasil wawancara hari rabu tanggal 29 februari 2017 pukul 10:00 wib dengan Ibu Rohaya selaku Orang Tua Siswa di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan bahwa perilaku dan tanggung jawab pihak sekolah terhadap siswa sudah mulai maksimal dikarnakan semua pasilitas sudah memadai dan belajar-mengajar sesuai dengan kurikulum..

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa prilaku atau sikap pihak sekolah dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah membaik dikarana setiap pasilitas sekolah sudah mulai lengkap ,

kebutuhan siswa sudah mulai terpenuhi dan proses belajar-mengajar sesuai dengan kurikulum .

4. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Proses penyampaian informasi kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah memperoleh informasi Standar Nasional Pendidikan, dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai media serta mendapatkan pelatihan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dan perlunya kejelian masyarakat dan siswa terhadap suatu media.

Berdasarkan hasil wawancara hari jum'at tanggal 24 februari 2017 pukul 10:00 wib dengan Bapak Saidin S.pd selaku kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan bahwa tenaga kependidikan memperoleh informasi standar nasional pendidikan, dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai media serta mendapatkan pelatihan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sedangkan hasil wawancara hari sabtu tanggal 25 februari 2017 pukul 10:30 wib dengan Ibu Isma Yunita selaku Tata Usaha Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh informasi standar nasional pendidikan, dengan pelatihan-pelatihan di berbagai wilayah serta memperoleh informasi dari berbagai media dan teknologi dari berbagai globalisasi. Bagaimana koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas

pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dapat berjalan dengan baik dengan mengadakan pelatihan dan kerjasama ditingkat kecamatan dan provinsi.

Sedangkan hasil wawancara hari senin tanggal 27 februari 2017 pukul 9:00 wib dengan Ibu Oma Noverita S.pd selaku guru Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh informasi Standar Nasional Pendidikan, melalui pelatihan guru-guru serta program kurikulum yang ada. Bagaimana koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik saling kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa tanggal 28 februari 2017 pukul 10:10 wib dengan Ibu Mimi Erniza S.pd selaku guru Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan bahwa tenaga kependidikan memperoleh informasi Standar Nasional Pendidikan, dengan cara diberikan peraturan yang berlaku oleh dinas kepada sekolah-sekolah, mengakses internet melalui web yang disediakan. Bagaimana koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas harus mempunyai hubungan yang erat dan saling mempercayai.

Sebagaimana hasil wawancara hari rabu tanggal 29 februari 2017 pukul 10:00 wib dengan Ibu Rohaya selaku orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah menyatakan dalam kaitannya cara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh informasi Standar Nasional Pendidikan, dengan diadakannya pelatihan dan menggunakan akses internet atau media cetak lainnya. Bagaimana koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan untuk

meningkatkan mutu pendidikan, saling kerja sama memberikan pendapat atau informasi dari berbagai pihak agar dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa proses pencapaian informasi dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah berjalan dengan baik dikarenakan pendidikan memperoleh informasi standar nasional pendidikan, dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai media serta mendapatkan pelatihan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

B. Pembahasan

Implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sudah mulai maksimal dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah.

Tujuan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang setandard nasional untuk meningkatkan mutu pendiddikan serta meningkatkan tingkat kelulusan yang berakhlak mulia dan taat kepada tuhan yang maha esa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber menyatakan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue sudah mulai

maksimal dikarenakan jumlah kelulusan meningkat setiap tahunnya hal berdasarkan data tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Tingkat Kelulusan Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Siswa Kelas VI	Lulus	Tidak Lulus
1	2013	67 Siswa	43 Siswa	17 Siswa
2	2014	77 Siswa	65 Siswa	12 Siswa
3	2015	98 Siswa	95 Siswa	3 Siswa
4	2016	105 Siswa	104 Siswa	1 Siswa

Sumber Data : SD N 5 Teupah Tengah

Berdasarkan tabel 3.7 bahwa jumlah keklulusan siswa Sekolah Dasar Teupah Tengah. Hal ini disebabkan keterlibatan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue melaksanakan pengawasan proses kebijakan di setiap sekolah yang berada di kabupaten Simeulue.

Sebagaimana yang dikemukakan Menurut Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai prubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian,

tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah mulai maksimal dikarenakan tingkat kelulusan meningkat setiap tahunnya di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah.

2. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pedoman atau aturan-aturan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang setandard nasional yaitu mengikuti kurikulum yang sedang berlaku dan perturan pemerintah yang terkait tentang pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pedoman atau aturan-aturan dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah mulai maksimal hal ini dikarenakan setiap guru mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara teratur dan guru-guru sudah mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dye (2005:17) bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pedoman pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa pedoman dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah maksimal dikarenakan semua guru sudah memacu pada kurikulum yang ada di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah.

3. Adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini membahas perilaku dan sikap tentang implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah, yaitu sikap tanggung jawab dalam mendidik dan mengajar di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa perilaku atau sikap pihak sekolah dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah membaik dikarenakan tanggung jawab guru dalam proses belajar mengajar sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan siswa juga sudah mematuhi tata tertip sekolah sehingga guru termotivasi dalam proses belajar mengajar.

Menurut Agustiono (2006:6) kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa perilaku atau sikap pihak sekolah dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah maksimal hal ini dikarenakan fasilitas sekolah sudah mulai lengkap dan kebutuhan siswa sudah mulai terpenuhi di Sekolah Dasar Negeri 5teupah Tengah.

4. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Proses penyampaian informasi dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang setandard nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendiddikanhal ini didukung oleh meningkatnya pengetahuan dibidang sosial media (internet) dan adanya pelatihan mengakses internet dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Simelue sehingga guru mengakses langsung informasi tentang setudi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa proses pencapaian informasi dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah berjalan dengan baik dikarenakan para guru memperoleh informasi standar nasional pendidikan, dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai media serta mendapatkan pelatihan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten Simeulue. Selain itu koordinasi yang dilakukan para pihak sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten Simeulue dalam meningkatkan mutu pendidikan, dinas pendidikan melakukan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tachjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa proses pencapaian informasi dari implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue sudah berjalan dengan maksimal hal ini dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai media serta mendapatkan pelatihan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diselenggarakan oleh dinas yang terkait seperti dinas pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, dalam pelaksanaan dari peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sudah berjalan dengan baik tetepi. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah:

1. tujuan dan sasaran kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah mencapai tujuan dengan meningkatnya jumlah kelulusan setiap tahunnya.
2. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah mulai terlaksana dikarenakan guru-guru sudah mengikuti kurikulum yang berjalan.
3. Adanya prilaku/sikap yang bertanggung jawab dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, standar sarana dan prasarana belum mencapai mutu pendidikan untuk standar yang lain mulai maksimal karena mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

4. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sudah mulai berjalan dengan baik dikarenakan dengan cara mendapatkan informasi dari berbagai media serta mendapatkan pelatihan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diselenggarakan oleh dinas yang terkait seperti dinas pendidikan.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ialah sebagai berikut :

- a. Dinas pendidikan lebih berperan aktif sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, sehingga pelayanan dan pengawasan bisa lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini.

- b. Pihak guru sebagai penerima ketentuan-ketentuan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, agar lebih mendukung semua kegiatan pemerintahan di Sekolah .
- c. Menerapkan sangsi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.
- d. Menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 5 Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, dengan situasi dan kondisi perkembangan siswa di Kabupaten simeulue sehingga diharapkan pihak sekolah meningatakan peran serta tugas melalui peraturan pemerintah tersebut.

Daftar Pustaka

- Amin, Zulkifli, Nur 2010, *Penghantar Pendidikan*, Dalam Diklat UMSU, medan.
- Amri, Sofian, 2013, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Dan Menengah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba, Jakarta.
- Duun, Wiliam N. 2003, *Penghantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada, University, Perss, Jakarta.
- Depdiknas, 2005, KBBI, *Balai Pustaka*, Jakarta.
- Susilo, Hartandi. 2007, *Analisi Kebijakan Publik Dewasa Ini*, Aksara Baru, Jakarta.
- Suryo Subroto, 2004, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Rineka Cipta.
- Solly, Hartandi, 2007, *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Tachan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Thomas, R, Dye, 2005, *Kabijakan Dan Kebijakan Punlik*, Roskadarya, Bandung.
- Tilaar, H, A, R, 2008, *Kebijakan Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Informasi Keimplementasian*, *Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustiono, 2006, *kebijakan public*, Caps, Yogyakarta.
-2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Winarno, 2010, *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Kebijakan

Sumber Internet

<http://informasilive.blogspot.com/2013/04/landasan-dana-asas-asas-pendidikan-serta.html>

www.salamedukasi.com/2005/10/tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kepala.html?m+1